

DAFTAR PUSTAKA

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 135).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 130).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228 /PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1744).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 56/PMK.01/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 596).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 719).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilai Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1098).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penetapan dan Pendaftaran Hak Atas Tanah Bekas Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda atau Badan Hukum Milik Belanda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 230).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Konsolidasi Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 756).

Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia (KPSPI), Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), 2018, Petunjuk Teknis Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII Tahun 2018.

Chapter V Land for Construction Purposes, Land Administration Law Of The People's Republic Of China (2004 Revision).

B. BUKU-BUKU

Sumardjono, M. S. W., 2015, *Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

- Koeswahyono, I., 2008, *Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum*.
- Harsono, B., 2009, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Sarjita, 2005, *Masalah Pelaksanaan Urusan Pertanahan dalam Era Otonomi Daerah*, Tugu Jogja, Yogyakarta.
- Sumardjono, M. S. W., 2001, *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi*, Buku Kompas, Jakarta.
- Sumardjono, M. S. W., 2008, *Tanah : Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya*, Buku Kompas, Jakarta.
- Sumardjono, M. S. W., 1996, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian : Sebuah Panduan Dasar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, UPT Mataram University, Press, Mataram.
- Sugiyono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Soekanto, S., 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Ali, Z., 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moleong, L. J., 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Marzuki, P. M., 2017, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kharisma Putra Utama, Jakarta.
- Arikunto, S., 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Dr. Kadarudin, S.H., M.H., CLA., 2021, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum*, Formaci, Semarang.
- Fajar, M. N. D. dan Achmad, Y., 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Isnandar, N. dan Arnowo, H., 2021, *Prinsip dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Indonesia*, SIP Publishing, Jawa Tengah.
- Utami, W. dan Sarjita, 2021, *Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa*, STPN Press, Yogyakarta.
- Shi, G., Jian, Z., dan Yu, Q., 2012, *Resettlement Induced by Dams in China, Impacts of Large Dams: A Global Assessment*.
- Zhang, C., 2011, *Technical Note 1, 'Overview of land policies and resettlement practices in rural areas of China'*, Involuntary Resettlement in China, China and Mongolia Sustainable Development Unit World Bank Office in Beijing, East Asia Pacific Region, World Bank.
- Wilmsen, B., 2016, *Expanding capitalism in rural China through land acquisition and land reforms*, *Journal of Contemporary China*, vol. 25, no. 101, Routledge Taylor & Francis Group, halaman 701–717.
- Tampubolon, C. A., Abubakar, L., dan Handayani, T., 2021, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 11 Tahun 2021: *Perlindungan Hukum Penilai Publik Terhadap Tuntutan Debitor Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Dan Ketentuan Jasa Penilai*, halaman 2079-2080.
- Rongiyati, S., 2012, *Eksistensi Lembaga Penilai Tanah dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, halaman 11-14.

- Parwez, S., 2015, *Modified labour welfare measure for special economic zone and implications. Shri Ram Centre for Industrial Relations & Human Resources, Indian Journal of Industrial Relations*, halaman 386–396;
- Ghatak, M. dan Mookherjee, D., 2011, *Land acquisition for industrialization and compensation of displaced farmers, Journal of Development Economics*, halaman 303-312;
- Morris, S. dan Ajay, P., 2009, *Land Markets in India: Distortions and Issues in India Infra-structure Report: Land – A Critical Resource for Infrastructure, IDFC, New Delhi: Oxford University Press*;
- Goswami, S., 2019, *Land Acquisition and Involuntary Displacement: A Study of Changing State Society Relations, Published in the Russian Federation European Researcher DOI*;
- Zhou, C. dan Banik, D., 2014, *Access to Justice and Social Unrest in China's Countryside: Disputes on Land Acquisition and Compensation, Hague Journal on the Rule of Law*, halaman 254–275;
- Cernea, M. M., 2000, *Risks, safeguards, and reconstruction: a model for population displacement and resettlement, in CERNEA, M. M. and MCDOWELL, C. (eds): Risks and Reconstruction: Experiences of Resettlers and Refugees, World Bank, Washington, DC*, halaman 11-55;

C. SITUS INTERNET

Maharani, A. dan Sekar, A., 2022, Mengupas Prosedur Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur,

<<https://www.kompas.com/properti/read/2022/02/09/113000921/mengupas-prosedur-pengadaan-tanah-untuk-pembangunan-infrastruktur?page=all>>, (diakses 06 Agustus 2022).

Budianto, A., 2021, Pembebasan Lahan Kereta Cepat Belum Tuntas, 6 Rumah di Bandung Terkatung-katung, <<https://jabar.inews.id/berita/pembebasan-lahan-kereta-cepat-belum-tuntas-6-rumah-di-bandung-terkatung-katung>>, (diakses 16 November 2022).

Law, ADCO, 2022, Metode Penelitian Hukum Dalam Pemecahan Masalah Hukum - ADCO Law, <<https://adcolaw.com/id/blog/metode-penelitian-hukum-dalam-pemecahan-masalah-hukum/>>, (diakses 07 Agustus 2022)

Sisma, A. F., 2022, Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum, <<https://katadata.co.id/agung/berita/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>>, (diakses 31 Oktober 2022).

Irawan, A. dan Nurhidayah, 2020, Perlukah Kode Etik Bagi Penilai Pemerintah?, <<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/13295/Perlukah-Kode-Etik-Bagi-Penilai-Pemerintah.html>>, (diakses tanggal 07 Agustus 2022);

- Resia, E., 2021, Tiga Pendekatan Penilaian Properti, Mana yang Paling Baik?, <<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekanbaru/baca-artikel/13849/Tiga-Pendekatan-Penilaian-Properti-Mana-yang-Paling-Baik.html>>, (diakses tanggal 16 November 2022);
- Lindsay, J. M., 2022, Compulsory Acquisition of Land and Compensation in Infrastructure Projects, <<https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/library/ppp-insights-compulsory-acquisition-land-and-compensation-infrastructure-projects-0>>, (diakses tanggal 13 Juni 2023);